

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

ANCAMAN SIBER TINGGI, ANGGARAN BSSN MINIM

Ardimansyah, Arya Sebastian, Carlence Maulen, Elsy, Nova Afidatunnisa



Aksi Bjorka menuai sorotan pihak di negeri ini mulai dari pemerintah hingga ke masyarakat umum. Penjualan data e-KTP, pembeberan sejumlah data pribadi yang dimiliki oleh pejabat RI, hingga pembobolan dokumen berharga milik negara. Bukti lain atas ancaman siber yang tinggi pada basis data di Indonesia adalah peningkatan ancaman siber sebesar 22 persen menjadi 11,8 juta di tahun 2022 yang pada tahun lalu sebesar 9,6 juta ancaman dilansir dari Kaspersky. Jumlah ancaman ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Perlu diketahui, bahwa National Cyber Security Index (NCSI) Indonesia tahun 2022 adalah 38,96 dengan peringkat ke-83 dari 160 negara. Indeks tersebut didukung dengan tingkat perkembangan digital sebesar 46,88. Berbeda dengan Maroko yang tingkat perkembangan digitalnya 46,88 namun memiliki NCSI 70,13 dengan peringkat 30. Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan tingkatan perkembangan digital yang sama, Maroko dapat mendapatkan posisi peringkat yang lebih tinggi. Melihat lebih dalam pada bagaimana Maroko mampu meningkatkan NCSI-nya meskipun dengan pengembangan digital yang setara dengan Indonesia, ternyata diketahui bahwa Maroko memperoleh pinjaman sebesar USD500 juta atau setara dengan Rp7,4 triliun dari World Bank tahun lalu. Sementara itu, Indonesia dengan tingkat pengembangan digital yang sama mengalokasikan anggaran yang kecil untuk keamanan siber dan pengembangan digital dan menurun tiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2023.

Tentunya sangat disayangkan anggaran penegakan keamanan siber di Indonesia diusung oleh lembaga BSSN sejak tahun 2021 hingga 2023 selalu mengalami penurunan, meskipun ancaman siber terus meningkat setiap harinya. Anggaran program ketahanan dan keamanan siber tahun 2021 sebesar Rp963 M, tahun 2022 turun hampir 85% hanya mendapatkan Rp153 M, dan tahun 2023 turun menjadi Rp120 M dengan total anggaran untuk BSSN pada 2023 sejumlah Rp624 M dimana sisanya sebanyak Rp504 M justru lebih banyak dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Anggaran tersebut setara dengan anggaran PT. BCA dalam penguatan sibernya, dimana pada Juli 2022 lalu, Vice President Bank BCA, Hera F.Haryn menjelaskan anggaran mereka pada tahun ini untuk penguatan siber adalah Rp500 miliar.

Dari perbandingan ini dapat kita lihat bahwa ada ketimpangan pada alokasi anggaran untuk BSSN, mengingat perusahaan swasta seperti BCA saja mengalokasikan Rp 500 miliar untuk keamanan siber, dimana nominal ini sama dengan anggaran pertahanan siber negara Indonesia, ditambah lagi dengan anggaran milik negara Maroko yang memiliki tingkat perkembangan digital yang sama dan memiliki luas negara yang lebih kecil yaitu 710.850 Km² jika dibandingkan dengan Indonesia yang luasnya adalah 1.904.569 Km².

Jika disimpulkan, Maroko mengeluarkan Rp7,4 triliun meningkatkan NCSI dari peringkat 102 ke 30 (72 ranking) dalam waktu dua tahun, dan Indonesia dari 107 ke 83 (24 ranking), artinya rasio yang dapat kita ambil adalah 1 : 3 (24 banding 72). Artinya, untuk negara seperti Indonesia yang memiliki luas serta populasi masyarakat yang banyak, tentunya alokasi anggaran untuk keamanan siber perlu ditinjau ulang pelaksanaannya, sebab negara yang memiliki cakupan kecil seperti Maroko saja memiliki anggaran yang lebih besar jika dibandingkan Indonesia. Namun di sisi lain anggaran BSSN hanya Rp1,72 triliun di 2021 dan bahkan turun menjadi Rp0,55 T di 2022, yang terdiri atas Rp152,8 miliar untuk program keamanan dan ketahanan BSSN, dan Rp.401,8 Miliar untuk dukungan manajemen.

Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan anggaran ketahanan dan keamanan siber salah satunya melalui realokasi anggaran. Disamping itu, pemerintah juga harus memperbaiki kerentanan fasilitas yang ada, memperbarui sistem secara teratur, pelacakan ancaman berkelanjutan, sistem kendali dan pengawasan jarak jauh, akuisisi data dan kecerdasan buatan yang terintegrasi terhubung. Apabila tidak melakukan pembaruan, dapat dikawatirkan kebocoran data yang akan mengancam keamanan data di Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar dapat memberikan alokasi anggaran tambahan di APBN yang dijadikan sebagai prioritas pendukung untuk menjaga keamanan teknis siber di era transformasi digital saat ini.